

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, salah satu bentuk penguasaan hutan oleh negara adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan areal hutan sebagai kawasan hutan.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara diatur dalam UU No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan. Dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan: “Dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah”. Pada ayat (2) disebutkan “Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah”.

Provinsi NTB terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Luas wilayah provinsi NTB 2.015.315 Ha yang terletak antara $115^{\circ}46'$ – $119^{\circ}5'$ BT dan $8^{\circ}10'$ – $9^{\circ}5'$ LS. Provinsi NTB memiliki kawasan hutan seluas 1.071.722,83 Ha. Pengurusan kawasan hutan tersebut diserahkan kepada Dinas terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

Dalam rangka pengurusan/pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan diperlukan bahan-bahan kajian berupa data dan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan arah pembangunan, sehingga penyusunan buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB sangat diperlukan demi pembangunan kehutanan ke depan tepat sasaran dan terarah.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2014, dimaksudkan untuk menyajikan data-data di Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan, Pemanfaatan Hutan, Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan, Balai Taman Hutan Raya Nuraksa dan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat. Adapun tujuannya untuk keperluan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan.

II. ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Dinas Kehutanan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan,
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang kehutanan,
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan,
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kehutanan,
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kehutanan,
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:

- I. Kepala Dinas,
- II. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan,
 - 2) Sub Bagian Keuangan,
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

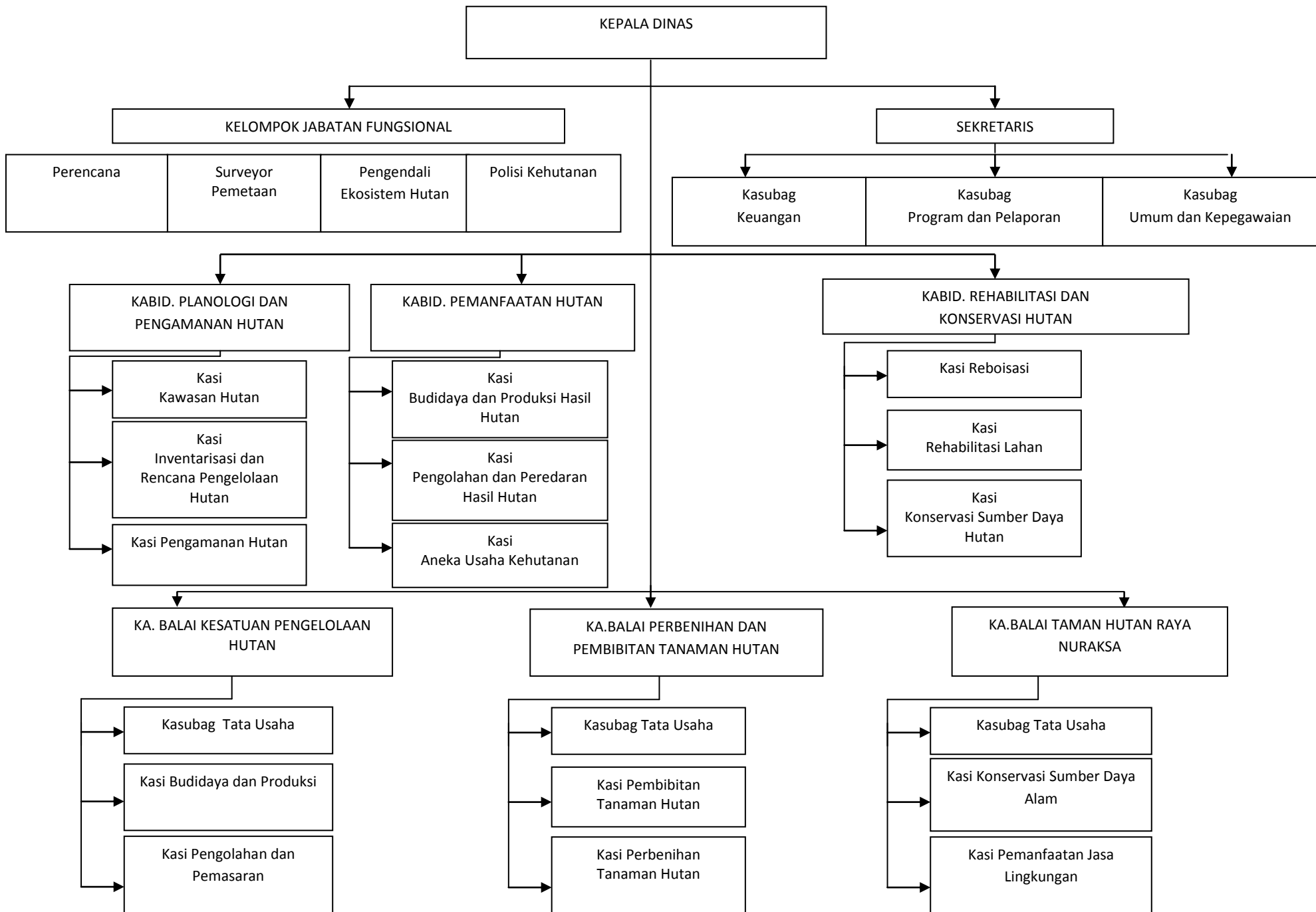
- III. Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kawasan Hutan,
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Rencana Pengelolaan Hutan,
 - 3) Seksi Pengamanan dan Penyuluhan.
- IV. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Budidaya dan Produksi Hasil Hutan,
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan,
 - 3) Seksi Aneka Usaha Kehutanan.
- V. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Reboisasi,
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lahan,
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan.
- VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 1) Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha,
 - b. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan,
 - c. Seksi Pembibitan Tanaman Hutan.
 - 2) Balai Taman Hutan Raya Nuraksa, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha,
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam,
 - c. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

- 3) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Budidaya dan Produksi
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

VII. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana,
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan,
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan,
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1. Data Jumlah PNS Menurut Pendidikan, Periode 2010-2014

No	Pendidikan	Jumlah PNS (orang)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	S3	0	0	0	1	0
2	S2	15	13	14	13	15
3	S1	39	45	51	51	51
	- S1 Kehutanan	6	7	12	14	13
	- S1 Non Kehutanan	33	38	39	37	38
4	Sarjana Muda	7	5	5	5	4
	- D3 Kehutanan	5	4	4	4	3
	- D3 Non Kehutanan	2	1	1	1	1
5	SMA	43	50	52	46	46
	- SMA Kehutanan	7	7	7	6	6
	- SMA Non Kehutanan	36	43	45	40	40
6	SMP	4	4	2	1	2
7	SD	7	7	5	3	3
TOTAL (orang)		115	112	129	120	121

Sumber : DUK Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 2.2. Data Jumlah PNS Menurut Golongan/Ruang, Periode 2010-2014

No	Golongan/Ruang	Jumlah PNS (orang)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Golongan IV	12	11	12	10	14
	- Golongan IV/d	0	0	1	1	0
	- Golongan IV/c	2	1	0	0	1
	- Golongan IV/b	3	2	3	4	4
	- Golongan IV/a	7	8	8	5	9
2	Golongan III	67	74	82	79	76
	- Golongan III/d	13	19	19	18	18
	- Golongan III/c	18	14	15	19	19
	- Golongan III/b	29	25	22	21	23
	- Golongan III/a	7	16	26	21	16
3	Golongan II	33	33	33	39	29
	- Golongan II/d	9	5	3	2	3
	- Golongan II/c	7	4	3	3	2
	- Golongan II/b	1	8	14	17	20
	- Golongan II/a	16	16	13	7	4
4	Golongan I	3	4	2	2	2
	- Golongan I/d	0	1	0	0	0
	- Golongan I/c	1	1	0	0	0
	- Golongan I/b	0	2	2	2	2
	- Golongan I/a	2	0	0	0	0
TOTAL (orang)		115	122	129	120	121

Sumber : DUK Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 2.3. Data Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Khusus dan Jabatan Fungsional Umum, Periode 2010-2014

No	Uraian	Jumlah PNS (orang)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jabatan Struktural	25	29	27	29	28
	- Eselon II a	1	1	1	1	1
	- Eselon III a	6	7	7	7	7
	- Eselon IV a	18	21	19	21	20
2	Jabatan Fungsional Khusus	18	18	14	18	18
	- Perencana	1	1	1	1	1
	- Pengendali Ekosistem Hutan	4	3	3	5	5
	- Polisi Kehutanan	7	6	5	7	7
	- Surveyor	5	5	5	5	5
3	Jabatan Fungsional Umum	73	78	88	73	75
TOTAL (orang)		115	112	129	120	121

Sumber : DUK Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 2.4. Data Realisasi Anggaran Belanja Sumber APBD & APBN, Periode 2010-2014

No	Sumber Anggaran	Anggaran Dan Realisasi														
		2010			2011			2012			2013			2014		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Anggaran (Rp)	Realisasi (%)		Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
			Keu	Fisik		Keu	Fisik		Keu	Fisik		Keu	Fisik		Keu	Fisik
1	APBN	3.698.910.000	93,40	97,50	3.420.750.000	96,75	99,00	4.950.442.000	96,97	100	5.394.203.000	97,78	100	3.937.505.000	99,09	100,00
2	APBD	11.444.436.918	90,20	97,89	13.026.324.900	92,67	99,28	12.237.114.500	91,48	99,83	14.280.776.300	93,32	100	13.239.663.900	93,09	100,00
TOTAL		15.143.346.918	91,80	97,70	16.447.074.900	94,71	99,14	17.187.556.500	94,23	99,92	19.674.979.300	95,55	100	16.992.168.900	96,09	100,00

Sumber : Laporan Bulanan APBD dan APBN Dishut NTB Tahun 2014

III. PLANOLOGI DAN PENGAMANAN HUTAN

Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan **mempunyai tugas**, melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk, perencanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi dalam urusan planologi dan pengamanan hutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan kawasan hutan,
- b. Pengelolaan urusan inventarisasi dan rencana pengelolaan hutan,
- c. Pengelolaan urusan pengamanan hutan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

- b. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Hutan Konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
- b. Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
- c. Taman Buru (TB).

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Taman Buru (TB) adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Berdasarkan hasil Berita Acara Tata Batas tahun 2010 dan Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi NTB adalah seluas 1.071.722,83 Ha.

Penutupan Lahan

Rekapitulasi Penutupan lahan/vegetasi di Prov. NTB diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Penafsiran untuk penutupan lahan/vegetasi baik itu yang berada di dalam kawasan hutan maupun pada areal penggunaan lain dibagi kedalam dua kelas utama yaitu areal berhutan seluas 746.503,43 Ha, areal tidak berhutan seluas 314.119,10 Ha.

Penggunaan Kawasan

Kawasan hutan bisa digunakan untuk kegiatan lain di luar sektor kehutanan. Penggunaan kawasan hutan tersebut dilakukan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin penggunaan kawasan hutan bisa diberikan untuk keperluan : religi, pertambangan, jalan umum, pembangunan jaringan telekomunikasi, dll. Penggunaan kawasan hutan di Prov. NTB meliputi IPPKH tambang, kepentingan umum terbatas dan komersial lainnya sebanyak 53 izin dengan luasan 259.073,47 Ha.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsi pokok dan peruntukannya KPH dapat berupa kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

Provinsi NTB memiliki 26 wilayah KPH yang terbagi dalam:

- a. KPH yang di kelola oleh Kementerian, KPH Konservasi (6 KPH)
- b. KPH yang dikelola Provinsi, KPH lintas (4 KPH)
- c. KPH yang di kelola Kabupaten (16 KPH)

Plot Sampling Permanent

Pembuatan Plot Sampling Permanent (PSP) Pengukuran Cadangan Karbon di Dalam Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2014 sejumlah 113 PSP. Total Penyerapan CO₂-eq Tahun pada hasil pengukuran tahun 2014 sebesar 274.125,77 ton/ tahun dengan kisaran besarnya cadangan karbon 11,56 – 312,89 ton/ha.

Permasalahan Tenurial dan Tindak Pidana Kehutanan

Permasalahan tenurial adalah merupakan permasalahan penggunaan kawasan hutan dan pendudukan kawasan hutan tanpa ijin dengan luas permasalahan tenurial sampai dengan tahun 2014 adalah 3.355,28 Ha Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan periode 2010-2014 sebanyak 168 kasus dan 51 kasus diantaranya telah mendapat vonis pengadilan.

Tabel 3.1. Data Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Konservasi	173.636,40
	- Cagar Alam	36.832,61
	- Taman Nasional	41.330,00
	- Suaka Margasatwa	21.674,68
	- Taman Buru	48.668,05
	- Taman Wisata Alam	21.976,06
	- Taman Hutan Raya	3.155,00
2	Hutan Lindung	447.272,86
3	Hutan Produksi	450.813,57
	- Hutan Produksi Tetap	160.085,74
	- Hutan Produksi Terbatas	290.727,83
TOTAL		1.071.722,83

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.2. Data Luas Kawasan Hutan Tiap Kabupaten/Kota Menurut Fungsi Hutan.

No.	Kab./Kota	Luas Wilayah (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)						Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)		Total Luas Kawasan Hutan (Ha)
			Kawasan Suaka Alam		Kawasan Pelestarian Alam			Taman Buru		Terbatas (HPT)	Tetap (HP)	
			CA	SM	TN	TWA	THR					
1	Kota Mataram	6.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	105.387,00	0	0	0	3.402,27	3.155,00	0	25.078,94	10.041,00	304,67	41.981,88
3	Lombok Utara	80.953,00	0	0	10.210,00	2.954,00	0	0	11.198,22	6.984,38	5.171,52	36.518,12
4	Lombok Tengah	120.840,00	0	0	3.675,00	2.149,29	0	0	9.926,14	0	4.583,89	20.334,30
5	Lombok Timur	160.555,00	0	0	27.445,00	0	0	0	31.498,67	0	5.565,00	64.508,67
6	Sumbawa	664.398,00	1.641,25	0	0	6.100,50	0	22.537,90	168.667,68	137.036,14	53.691,88	389.675,35
7	Sumbawa Barat	184.902,00	524,00	0	0	4.538,00	0	0	66.230,71	35.391,94	18.651,11	125.335,76
8	Dompu	232.460,00	13.572,34	3.988,60	0	2.600,00	0	9.543,56	51.482,59	32.586,78	26.119,11	139.892,98
9	Bima	438.940,00	21.095,02	17.686,08	0	232,00	0	16.586,59	82.866,11	67.190,59	44.740,03	250.396,42
10	Kota Bima	20.750,00	0	0	0	0	0	0	323,80	1.497,00	1.258,53	3.079,33
TOTAL		2.015.315,00	36.832,61	21.674,68	41.330,00	21.976,06	3.155,00	48.668,05	447.272,86	290.727,83	160.085,74	1.071.722,83

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.3. Data Penutupan Lahan Kawasan Hutan Berdasarkan Perhitungan NSDH

No.	Fungsi	Hutan Lahan Kering Primer		Hutan Lahan Kering Sekunder		Hutan Tanaman		Jumlah Areal Berhutan		Tidak Berhutan		JUMLAH TOTAL
		Jumlah (Ha)	%	Jumlah (Ha)	%	Jumlah (Ha)	%	Jumlah (Ha)	%	Jumlah (Ha)	%	Jumlah
1	Hutan Konservasi	42.938,90	9,97	58.570,74	19,82	0	0	101.509,64	13,60	61.026,46	19,43	162.536,10
2	Hutan Lindung	240.691,00	55,90	112.839,42	38,19	0	0	353.530,42	47,36	93.742,48	29,84	447.272,90
3	Hutan Produksi Terbatas	114.580,10	26,61	78.179,24	26,46	2.450,00	11,96	195.209,34	26,15	93.973,76	29,92	289.183,10
4	Hutan Produksi Tetap	32.347,00	7,51	45.879,54	15,53	18.027,49	88,04	96.254,43	12,89	65.376,40	20,81	161.630,43
	JUMLAH	430.557,00	100	295.468,94	100	20.477,49	100	746.503,43	100	314.119,10	100	1.060.622,53

Sumber : Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Tabel 3.4. Data Panjang Batas Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Batas P. Lombok Dan P. Sumbawa

No	Lokasi	Panjang Batas (Km)				Total (Km)
		Luar			Dalam/Fungsi	
		Buatan	Alam	Jumlah		
1	P. Lombok	1.088,81	75,21	1.164,02	214,41	1.378,43
2	P. Sumbawa	4.507,33	520,28	5.027,61	1.538,47	6.566,08
Total		5.596,14	595,49	6.191,63	1.752,88	7.944,51

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.5. Data Luas Penggunaan Kawasan Hutan Menurut Jenis Penggunaan s/d Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Penggunaan (Ha)							Total (Ha)
		Pertambangan	Instalasi Listrik	Jaringan Komunikasi	Jalan	Instalasi Air	Fasilitas Umum	Sarpras Keselama- tan	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	0	0	0,30	0	0	0	0,08	0,38
3	Lombok Barat	9.583,00	0	0	23,48	23,80	0	0,55	9.630,83
4	Lombok Tengah	0	0	0,16	0	0	0	0	0,16
5	Lombok Timur	0	0,02	0	0	7,59	0	0	7,61
6	Sumbawa Barat	103.952,00	0	0	0	0	0	0	103.952,00
7	Sumbawa	125.236,30	0,15	47,37	352,01	5,30	0	0	125.641,13
8	Dompu	44,00	0	9,23	52,25	10,04	11,25	0	126,77
9	Bima	19.524,00	0	11,40	11,28	162,10	0	0	19.708,78
10	Kota Bima	0	1,00	0	0	4,81	0	0	5,81
TOTAL		258.339,30	1,17	68,46	439,02	213,64	11,25	0,63	259.073,47

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.6. Data Jumlah Izin Penggunaan Kawasan Hutan Menurut Jenis Penggunaan

No	Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan							Total Izin
		Pertambangan	Instalasi Listrik	Jaringan Komunikasi	Jalan	Instalasi Air	Fasilitas Umum	Sarpras Keselamatan	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	0	0	2	0	0	0	1	3
3	Lombok Barat	2	0	0	0	0	0	1	3
4	Lombok Tengah	0	0	1	1	2	0	0	4
5	Lombok Timur	0	1	0	0	2	0	0	3
6	Sumbawa Barat	4	0	0	0	0	0	0	4
7	Sumbawa	12	1	4	5	2	0	0	24
8	Dompu	1	0	1	1	1	1	0	5
9	Bima	2	0	1	1	1	0	0	5
10	Kota Bima	0	1	0	0	1	0	0	2
TOTAL		21	3	9	8	9	1	2	53

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.7. Data Perkembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Nama KPH	Luas Berdasarkan SK.337	Luas Berdasarkan Tata Batas (Ha)	Lokasi	Perkembangan
1	KPH PUSAT (6 Unit)				
	- KPHK-TN Gunung Rinjani	41.330,00	41.330,00	Kab.Lobar, Loteng, Lotim, KLU	Operasionalisasi
	- KPHK-Lombok	6.668,29	6.668,29	Kab.Lobar, Tengah	Belum realisasi
	- KPHK-Sumbawa Barat	4.242,80	4.242,80	Kab. Sumbawa Barat	Belum realisasi
	- KPHK-Tambora	74.245,64	74.245,64	Kab. Dompu, Bima	Belum realisasi
	- KPHK-Pulau Moyo	28.638,40	28.638,40	Kab. Sumbawa	Belum realisasi
	- KPHK-Sangeang	11.058,55	11.058,55	Kab. Bima	Belum realisasi
2	KPH PROVINSI (4 Unit)				
	- KPHL-Rinjani Barat	40.983,00	43.550,23	Kab. Lombok Utara dan Lobar	Operasionalisasi, Model
	- KPHP-Maria Donggomasa	70.651,00	72.960,74	Kab. Bima dan Kota Bima	Tahap persiapan
	- KPHL-Ampang Riwo Soromandi	88.129,00	90.220,55	Kab. Sumbawa, Dompu dan Bima	Tahap persiapan
	- KPHP-Tambora	57.181,00	62.602,01	Kab. Dompu - Kab.Bima	Tahap persiapan
3	KPH KABUPATEN (16 Unit)				
	- KPHP-Pelangan	19.636,00	17.555,00	Kab. Lombok Barat	Belum realisasi
	- KPHL-Tastura	17.529,00	16.269,12	Kab. Lombok Tengah	Belum realisasi
	- KPHL-Rinjani Timur	37.589,00	37.063,67	Kab. Lombok Timur	Operasionalisasi, Model
	- KPHL-Brang Rea	45.485,00	46.124,61	Kab. Sumbawa Barat	Operasionalisasi
	- KPHP-Sejorong	41.579,00	41.698,05	Kab. Sumbawa Barat	Operasionalisasi
	- KPHL-Matayang	34.448,00	32.107,00	Kab. Sumbawa Barat	Operasionalisasi
	- KPHP-Batulanteh	32.776,00	31.869,47	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi, Model
	- KPHL-Ampang	38.681,00	37.841,09	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi, Model
	- KPHL-Pucak Ngengas	43.725,46	45.302,00	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi
	- KPHP-Orong Telu	57.139,00	59.903,13	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi

No	Nama KPH	Luas Berdasarkan SK.337	Luas Berdasarkan Tata Batas (Ha)	Lokasi	Perkembangan
	- KPHP- Brang Beh	63.401,00	61.738,74	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi
	- KPHP-Plampang	28.725,00	35.553,08	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi
	- KPHL-Ropang	73,369,00	69.492,18	Kab. Sumbawa	Operasionalisasi
	- KPHL-Toffo Pajo	26.190,00	31.426,47	Kab. Dompu	Operasionalisasi
	- KPHP-Waworada	20.695,00	20.629,57	Kab. Bima	Belum realisasi
	- KPHP-Madapangga Rompu	49.722,00	51.483,10	Kab. Bima	Belum realisasi

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.8. Data Pembuatan Plot Sampling Permanent (PSP) Pengukuran Cadangan Karbon di Dalam Kawasan Hutan

No	Nama Kab/ Kota	Jumlah Plot Sampling Permanent (PSP)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	0	0	0	0	4
3	Lombok Utara	0	0	9	0	4
4	Lombok Tengah	0	0	15	0	12
5	Lombok Timur	0	0	9	0	15
6	Sumbawa	0	0	0	0	11
7	Sumbawa Barat	0	0	0	0	7
8	Dompu	0	0	0	0	15
9	Bima	0	0	0	0	8
10	Kota Bima	0	0	0	0	4
TOTAL		0	0	33	0	80

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.9. Data Penyerapan CO2-eq Tahun dan Kisaran Besarnya Cadangan Karbon pada PSP di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2014

No	Nama Kab/ Kota	Jumlah PSP	Total Penyerapan CO2-eq Tahun (Ton)	Kisaran Besarnya Cadangan Carbon (Ton/Ha)	Rata-rata Besarnya Cadangan Carbon (Ton/Ha)
1	Kota Mataram	0	0	0	0
2	Lombok Barat	4	34.747,96	133,44-156,29	130,56
3	Lombok Utara	4	5.707,66	54,71-256,27	155,52
4	Lombok Tengah	12	40.376,54	32,33-312,89	79,81
5	Lombok Timur	15	74.074,13	25,13-299,57	105,89
6	Sumbawa	11	28.737,94	11,56-154,98	57,43
7	Sumbawa Barat	7	10.540,88	29,85-69,57	24,46
8	Dompu	15	40.219,88	50,40-132,63	86,51
9	Bima	8	32.029,36	34,94-154,43	55,66
10	Kota Bima	4	7.691,42	53,74-71,86	59,95
TOTAL		80	274.125,77	11,56-312,89	80,95

Sumber : Bidang Planologi dan Pemhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.10. Data Tindak Lanjut Penyelesaian Tenurial dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prov. NTB sampai tahun 2014

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
1	Kota Mataram	-	-	-	-	-
2	Lombok Barat	Transad Desa Batu Putih Kec. Sekotong	Pelangan/ HP,TWA	90	Transmigrasi Purnawirawan AD	Diusulkan menjadi enclave karena Transad sudah ada sebelum pengukuhan hutan sesuai Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012
		Desa Buwun Mas Kec. Sekotong	Pelangan/ HL	1,4	Villa, Hotel/ Bungalow Perorangan	Pemberian peringatan dan diproses sesuai ketentuan
		Desa Buwun Mas Kec. Sekotong	Pelangan/ HL, HPT	250	Perambahan masyarakat	Pencadangan Menhut (usulan)
		Desa Batu Putih Kec. Sekotong	Pelangan/ TWA	900	Perambahan masyarakat dari Loteng	Perlu evaluasi keseriusan IPPA, Perlu kesepakatan dengan Pemda Lobar serta TNI/Polri sebelum melakukan pengamanan
3	Lombok Utara	Desa Rempek Kec. Gangga	Gunung Rinjani/ HP	80	Sertifikat dalam kawasan hutan	Sebagian pemegang sertifikat bersedia mengikuti program KPH Rinjani Barat
		Desa Rempek Kec. Gangga	Gunung Rinjani/ HP	87	Perambahan/ lahan garapan masyarakat	Telah diupayakan semuanya masuk program kehutanan dan telah dilakukan operasi pembongkaran pondok kerja
		Desa Akar-akar Kec. Bayan	Gunung Rinjani/ HP	100	Perambahan/ kebun/ garapan dan pemukiman masyarakat	Pembatalan SPPT dan bukti milik, sosialisasi program dan peraturan kehutanan dan penertiban bangunan permanen
		Desa Senaru Kec. Bayan	Gunung Rinjani/ HP	26	Hotel dan pemukiman masyarakat	Bukti kepemilikan agar dikonsultasikan dengan BPN mengenai jenis Hak dan akan diproses sesuai ketentuan

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
4	Lombok Tengah	Desa Mangkung Kec. Praya Barat	Marejebonga/ HP	4,39	Perambahan/ lahan garapan masyarakat dan pemukiman	Pencabutan PBB dan diupayakan masuk program kehutanan (HKm, HTR), penertiban bangunan permanen, pembentukan kelompok tani hutan sebagai calon pemegang izin HKm/HTR
		Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat	Marejebonga/ HP	14,45	Perambahan/ lahan garapan masyarakat dan pemukiman	Pencabutan PBB dan diupayakan masuk program kehutanan (HKm, HTR), penertiban bangunan permanen, pembentukan kelompok tani hutan sebagai calon pemegang izin HKm/HTR
		Desa Selar dan Desa Slemang Kec. Pujut	Gunung Pepe/ HPT	300	Penguasaan untuk garapan, pemukiman dan sekolah	BKPH segera melaksanakan identifikasi dan tata batas enclave
5	Lombok Timur	Desa Bagik Manis Kec. Sambelia	Gunung Rinjani/ HP	30	Sekolah dan pemukiman penduduk	Perlu penegasan batas kawasan hutan dan batas kelola HKm dan HTI, fasilitas umum yang ada diproses melalui IPPKH dan penindakan terhadap masyarakat pendatang yang beraktifitas dalam kawasan hutan
		Desa Sambelia Kec. Sambelia	Gunung Rinjani/ HP	12	Perambahan/ lahan garapan dan pemukiman masyarakat	Perlu penegasan batas kawasan hutan dan batas kelola HKm dan HTI, fasilitas umum yang ada diproses melalui IPPKH dan penindakan terhadap masyarakat pendatang yang beraktifitas dalam kawasan hutan
		Desa Dara Kunci Kec. Sambelia	Gunung Rinjani/ HP	200	Perambahan/ kebun dan lading yang terdapat SPPT masyarakat	Penindakan hokum terhadap oknum yang terlibat perambahan
		Desa Sapit Kec. Swela	Gunung Rinjani/ HL	1.000	Perambahan lading dan kebun masyarakat	Sebagian telah direboisasi dan sebagian masuk program HKm
		Desa Pemokong Kec. Jerowaru	Sekaroh/ HL	140	Masjid, pemukiman dan kebun/lading masyarakat	Penertiban penguasaan lahan dan bangunan permanen serta menyesuaikan dengan rencana pengelolaan KPH Rinjani Timur

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
		Desa Sekaro Kec. Jerowaru	Sekaroh/ HL	235	Ladang dan kebun masyarakat	Penertiban penguasaan lahan dan bangunan permanen serta menyesuaikan dengan rencana pengelolaan KPH Rinjani Timur
		Desa Sekaroh Kec. Jerowaru	Sekaroh/ HL	5	Penginapan semi permanen PT. Lombok Saka	PT. Lombok Saka agar mengajukan permohonan ijin
6	Sumbawa	Desa Semamung Kec. Moyo Hulu	Buinsoway/ HP	5	Pembangunan SMU dan pekarangan	Telah diproses tukar menukar sampai rekomendasi Gubernur areal pengganti menggabung KH Pusuk Pao
		Desa Serading Kec. Maronge	Serading/ HP	250	Sawah dan kebun masyarakat	Telah direkonstruksi tahun 2000 dan telah diperingati, namun tetap menguasai lahan dan makin meluas
		Desa Boak Kec. Moyo Hulu	Buinsoway/ HP	10	Perambahan berupa kebun dan bangunan masyarakat	-
		Desa Simu Kec. Maronge	Dodo Jaranpusang/ HPT	50	Pembangunan DAM tanpa IPPKH oleh Kementerian PU	Dikonsultasikan dengan Kemenhut
		Desa Brangkolong Kec. Maronge	Dodo Jaranpusang/ HPT	4	Pembangunan Embung tanpa IPPKH oleh Kementerian PU	Mengajukan IPPKH kepada Gubernur
		Desa Labangka (II/IV) Kec. Labangka	Dodo Jaranpusang/ HPT	2,5	Pembangunan Embung tanpa IPPKH oleh Kementerian PU	Mengajukan IPPKH kepada Gubernur

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
		Desa Sukamulia Kec. Labangka	Dodo Jaranpusang/ HPT	50	Areal transmigrasi yang berada dalam kawasan hutan	Telah dilakukan peninjauan dan pembahasan yang akan diproses melalui tukar menukar (areal pengganti sekitar KH. Pusuk Pao)
		Desa Labuhan Senggoro Kec. Maronge	Santong Labubaron/ HPT	10	Tambak masyarakat	Penindakan hukum
		Desa Tepal Kec. Orong Telu	Batulante/ HPT	3	Dusun dalam kawasan hutan	Pemukiman diproses tukar menukar dan lahan garapan masuk program kehutanan
		Desa Ledang Kec. Ropang	Runtung Sebokas/ HPT	50	Pemukiman dan lahan garapan masyarakat	Pemukiman diproses tukar menukar dan lahan garapan masuk program kehutanan
		Desa Teluk Santong Kec. Maronge	Santong Labubaron/ HPT	100	Rencana Pelabuhan barang	Diproses tukar menukar dengan areal pengganti disekitar KH. Pusuk Pao dan telah ada rekomendasi Gubernur
		Desa Lendangguar Kec. Lendangguar	Kerawak Utuk/ HP	1,1	Bendung dan saluran irigasi PU/ Pemda Sumbawa	Pemda/ Menteri PU agar mengajukan IPPKH ke Gubernur
		Desa Toloui Kec. Terano	Ampang Kampaja/ HL	250	Perambahan/ perluasan transmigrasi Toloui	Belum dilakukan identifikasi
7	Sumbawa Barat	Desa Meraran Kec. Seteluk	Olat Lemusung/ HL	10	Perluasan areal lahan garapan dan pemukiman masyarakat	Diupayakan tukar menukar, karena posisi Desa Meraran dikelilingi kawasan hutan dan masih banyak bukit di luar kawasan hutan (daerah sekitar Taliwang)
		Desa Kelanir, Mantar Kec. Seteluk	Olat Lemusung/ HL	3	Pembangunan jalan menuju enclave Mantar	Jalan tersebut dibuka melalui ABRI Manunggal Desa (AMD) sekitar tahun 1994

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
		Desa Tongo Kec. Sekongkang	Selalu Legini/ HL, HPT	43,41	Pembangunan jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa	PU mengajukan permohonan rekomendasi Gubernur dan mengajukan IPPKH ke Menhut
		Desa Bakatmonte Kec. Brang Rea	Olat Lemusung/ HL	6,7	Peningkatan jalan menuju enclave Rarak (dari tanah menjadi aspal)	-
		Desa Meraran, Sampir, Lamunga, Kertasari, Kelanir Kec. Seteluk dan Taliwang	Olat Lemusung/ HL	3.000	Alih fungsi dari HL menjadi HPT pada sebagian KH. Olat Lemusung (bagian selatan)	Revisi tata ruang sebagian KH Olat Lemusung dari HL ke HPT
8	Dompu	Desa Tambora Kec. Pekat	Tambora/ HP	15	Pemukiman dan kebun	Rekomendasi Tim terpadu Kemenhut, bahwa terdapat kawasan hutan lindung (Sukadamai) yang masuk dalam tukar menukar disarankan mengajukan permohonan ke Ditjen PHKA
		Desa Doropeti Kec. Pekat	Tambora/ HP	15	Perluasan transmigrasi	sda
		Desa Kesi Kec. Kempo	Tambora/ HP	125	Areal transmigrasi	sda
		Desa Taropo Kec. Kilo	Soromandi/ HP	203,8	Areal transmigrasi	sda
		Desa Tanju Kec. Manggelewa	Soromandi/ HP, HPT	253	Rencana genangan Dam Tanju	sda
		Desa Tanju Kec. Manggelewa	Soromandi/ HP, HPT	200	Rencana lahan pertanian	sda
		Desa Tanju Kec. Manggelewa	Soromandi/ HP, HPT	11,61	Rencana genangan Dam Kancu	sda

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
		Desa Kramabura Kec. Dompu	Soromandi/ HP, HPT	55,2	Perluasan Desa Kramabura	sda
		Desa Soro Kec. Kempo	Riwo/ HPT	24,54	Perluasan Desa Kempo	sda
		Desa Katua Kec. Dompu	Toffo Rompu/ HPT	55,7	Transmigrasi Katua	sda
		Desa Madaprama dan Desa Bara Kec. Woja	Soromandi/ HP	80,99	Jalan Lingkar Kota Dompu	sda
		Desa Riwo Kec. Woja	Riwo/ HPT	2	Pembangunan SD Riwo	sda
		Desa Riwo Kec. Woja	Riwo/ HPT	89,68	Perluasan kampung nelayan	Sda
		Desa Sukadamai Kec. Manggelewa	Tambora/ HL	361	Areal transmigrasi Sukadamai	Alih fungsi dari HL ke HPT dan telah ditinjau tim terpadu kemenhut
		Desa Adu Kec. Hu'u	Pajo/ HP	41,85	Perluasan pelabuhan ikan dan kampung nelayan	sda
9	Bima	Desa Rontu Kec. Langgudu	Nipa Pusu/ HP	18	Kebun Bawang masyarakat	-
		Desa Rontu, Tamandaka, Pusu Kec. Langgudu	Nipa Pusu/ HP	3,2	Jalan Pengerasan	Pemda/ Menteri PU agar mengajukan IPPKH ke Gubernur
		Desa Madawau Kec. Madapangga	Toffo Rompu/ HL	100	Perambahan/ pertanian masyarakat	Program HKm ditolak sebagian warga dan hingga saat ini belum ada penyelesaian

No	Nama Kab/ Kota	Lokasi	Kelompok Hutan/ Fungsi	Perkiraan Luas (Ha)	Jenis Tenurial/ Masalah	Tindak Lanjut
		Desa Waduruka Kec Langgudu	Nipa Pusu/ HPT	39	Perambahan/ pertanian masyarakat	Penertiban perambah dan penghutanan kembali melalui program kehutanan
		Desa Rato Kec. Lambu	Kota Donggomasa	72	Perambahan/ pertanian masyarakat	Penertiban perambah dan penghutanan kembali melalui program kehutanan
		Desa Parado Wane Kec. Parado	Toffo Rompu/ HPT	35	Perambahan/ pertanian masyarakat	Penertiban perambah dan penghutanan kembali melalui program kehutanan
10	Kota Bima	Desa Kolo Kec. Asakota	Nanganae Kapenta	183	Pemukiman, fasilitas umum (sekolah, masjid, kantor lurah, puskesmas, kantor PLN) dan kebun aktif	Sarana pemerintah diproses/ disarankan melalui IPPKH dan pemukiman diupayakan tukar menukar sedangkan kebun/ ladang masuk program HKm. Areal pengganti \pm 22 ha
TOTAL				3.355,28		

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

Tabel 3.11. Data Tindak Pidana Kehutanan Menurut Jenis Gangguan, Periode 2010-2014

No	Jenis Gangguan	Jumlah Kasus dan Vonis										Total	
		2010		2011		2012		2013		2014			
		Kasus	Vonis	Kasus	Vonis	Kasus	Vonis	Kasus	Vonis	Kasus	Vonis	Kasus	Vonis
1	Pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen legalitas kayu	23	16	6	1	7	0	3	0	10	10	49	27
2	Penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah	11	5	12	1	3	0	17	9	5	5	48	20
3	Kebakaran hutan	0	0	3	0	0	0	4	0	12	0	19	0
4	Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	5	0	8	0	0	0	7	0	2	2	22	2
5	Penggembalaan liar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Membawa alat yang lazim dipakai untuk menebang dan membuka lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Memiliki hasil hutan tanpa dokumen yang sah	0	0	1	0	7	0	0	0	1	1	9	1
8	Perusakan Sarpras Perlindungan hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
TOTAL		39	21	30	2	17	0	31	9	36	19	168	51

Sumber : Bidang Planologi dan Pamhut Dishut NTB Tahun 2014

IV. REHABILITASI DAN KONSERVASI HUTAN

Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan **mempunyai tugas**, melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk, kegiatan, pembinaan, pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan reboisasi,
- b. Pelaksanaan urusan rehabilitasi lahan dan urusan konservasi sumber daya hutan,
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktifitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Luas lahan kritis di Provinsi NTB sampai dengan 2013 adalah 239.815,95 Ha terdiri dari sangat kritis 18.905,24 Ha dan kritis 220.910,71 Ha.

Reboisasi

Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Dalam kurun waktu 2010 – 2014 luas lahan yang ditanami seluas 16.649 Ha.

Penghijauan

Penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. Luas lahan yang diluar kawasan hutan yang ditanami selama tahun 2010 – 2014 mencapai 26.811,47 Ha.

Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah penerapan teknik konservasi tanah dan air disamping kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan pengayaan tanaman. Penerapan teknik konservasi tanah dan air berupa pembangunan dam pengendali, dam penahan, sumur resapan air, embung, parit buntu/lorak, pengendali jurang dll dengan tujuan untuk mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan pengelolaan hutan secara lestari.

Tabel 4.1. Data Luas Lahan Kritis Pada Kawasan Hutan di Provinsi NTB Berdasarkan Fungsi Hutan

No	Fungsi Hutan	Luas Lahan Kritis (Ha)		Total (Ha)
		Sangat Kritis	Kritis	
1	Cagar Alam	10.806,64	7.070,48	17.877,12
2	Suaka Margasatwa	1.084,65	19.594,25	20.678,90
3	Taman Buru	0	16.154,88	16.154,88
4	Taman Nasional	1.132,79	10.674,67	11.807,46
5	Taman Wisata Alam	0	5.053,31	5.053,31
6	Taman Hutan Raya	0	754,57	754,57
7	Kawasan Suaka Alam	0	923,29	923,29
8	Hutan Lindung	1.779,24	42.116,74	43.895,98
9	Hutan Produksi Terbatas	1.563,78	70.330,93	71.894,71
10	Hutan Produksi Tetap	2.538,14	48.237,58	50.775,72
TOTAL		18.905,24	220.910,71	239.815,94

Sumber : Balai DAS Dodokan Moyosari NTB tahun 2013

Tabel 4.2 . Data Luas Kegiatan Reboisasi Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Kegiatan Reboisasi (Ha)					Total (Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	545	1.200	2.439	400	526	5.110
3	Lombok Tengah	685	675	655	315	400	2.730
4	Lombok Timur	0	235	455	20	545	1.555
5	Lombok Utara	250	598	1.802	0	453	3.103
6	Sumbawa Barat	10	0	45	28	34	117
7	Sumbawa	436	290	223	190	210	1.349
8	Dompu	345	330	225	150	150	1.200
9	Bima	200	250	400	100	150	1.100
10	Kota Bima	0	50	35	150	50	285
TOTAL		2.471	3.628	6.279	1.353	2.918	16.649

Sumber : Statistik Kab./Kota dan Bidang RKH Dishut NTB

Tabel.4.3. Data Luas Kegiatan Reboisasi Tiap Kegiatan, Periode 2010-2014

No	Kabupaten /Kota	Thn	Luas Reboisasi Tiap Kegiatan (Ha)						TOTAL
			HTR dan HKm	HTCPE & HHBK	Silvopastura /Rawan Bencana	RSMA	DAK Provinsi	DAK Kab/Kota	
1	Kota Mataram		0	0	0	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat		50	40	0	150	3.260	1.610	5.110
		2010	0	0	0	0	70	475	545
		2011	0	20	0	50	730	400	1.200
		2012	0	20	0	50	1.959	410	2.439
		2013	0	0	0	0	300	100	400
		2014	50	0	0	50	201	225	526
3	Lombok Tengah		50	75	0	0	0	2.590	15
		2010	0	25	0	0	0	660	685
		2011	0	25	0	0	0	635	675
		2012	0	25	0	0	0	630	655
		2013	0	0	0	0	0	315	315
		2014	50	0	0	0	0	350	400
4	Lombok Timur		100	0	200	100	0	840	15
		2010	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	50	0	170	235
		2012	0	0	0	50	0	405	455
		2013	0	0	0	0	0	20	20

No	Kabupaten /Kota	Thn	Luas Reboisasi Tiap Kegiatan (Ha)							TOTAL
			HTR dan HKm	HTCPE & HHBK	Silvopastura /Rawan Bencana	RSMA	DAK Provinsi	DAK Kab/Kota	Mangrove	
		2014	100	0	200	0	0	245	0	545
5	Lombok Utara		50	0	0	0	1.415	1.638	0	3.103
		2010	0	0	0	0	0	250	0	250
		2011	0	0	0	0	0	598	0	598
		2012	0	0	0	0	1.315	487	0	1.802
		2013	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014	50	0	0	0	100	303	0	453
6	Sumbawa Barat		0	10	0	0	0	101	6	117
		2010	0	10	0	0	0	0	0	10
		2011	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0	0	45	0	45
		2013	0	0	0	0	0	22	6	28
		2014	0	0	0	0	0	34	0	34
7	Sumbawa		0	0	140	50	0	1.159	0	1.349
		2010	0	0	50	50	0	336	0	436
		2011	0	0	50	0	0	240	0	290
		2012	0	0	40	0	0	183	0	223
		2013	0	0	0	0	0	190	0	190
		2014	0	0	0	0	0	210	0	210
8	Dompu		0	40	50	100	0	1.010	0	1.200
		2010	0	20	50	100	0	175	0	345
		2011	0	20	0	0	0	310	0	330
		2012	0	0	0	0	0	225	0	225
		2013	0	0	0	0	0	150	0	150
		2014	0	0	0	0	0	150	0	150

No	Kabupaten /Kota	Thn	Luas Reboisasi Tiap Kegiatan (Ha)							TOTAL
			HTR dan HKm	HTCPE & HHBK	Silvopastura /Rawan Bencana	RSMA	DAK Provinsi	DAK Kab/Kota	Mangrove	
9	Bima		0	0	0	100	0	1.000	0	1.100
		2010	0	0	0	50	0	150	0	200
		2011	0	0	0	0	0	250	0	250
		2012	0	0	0	50	0	350	0	400
		2013	0	0	0	0	0	100	0	100
		2014	0	0	0	0	0	150	0	150
10	Kota Bima		0	0	85	0	0	200	0	285
		2010	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	50	0	0	0	0	50
		2012	0	0	35	0	0	0	0	35
		2013	0	0	0	0	0	150	0	150
		2014	0	0	0	0	0	50	0	50
Jumlah		2010	0	55	100	200	70	2.046	0	2.471
		2011	0	65	100	100	730	2.603	30	3.628
		2012	0	45	75	150	3.274	2.735	0	6.279
		2013	0	0	0	0	300	1.047	6	1.353
		2014	350	0	200	50	301	1.717	0	2.618
TOTAL			350	165	475	500	4.675	10.148	36	16.649

Sumber : Realisasi DAK Bidang Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2014

Tabel 4.4. Data Luas Kegiatan Penghijauan Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Luas Kegiatan Penghijauan (Ha)					Total (Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	25,00	8,00	40,00	0	0	73,00
2	Lombok Utara	145,00	175,00	150,00	935,00	138,00	1.543,00
3	Lombok Barat	170,00	525,80	396,16	4.478,00	435,00	6.004,96
4	Lombok Tengah	915,00	675,00	257,13	305,00	191,00	2.343,13
5	Lombok Timur	170,00	375,00	350,00	163,00	725,00	1.783,00
6	Sumbawa Barat	60,00	100,00	251,60	864,00	125,00	1.400,00
7	Sumbawa	60,00	250,00	450,00	590,00	550,00	1.900,00
8	Dompu	211,89	170,89	215,00	2.991,00	63,00	3.651,78
9	Bima	153,00	132,00	260,00	6.567,00	492,00	7.604,00
10	Kota Bima	120,00	50,00	100,00	163,00	75,00	508,00
TOTAL		2.029,89	2.460,80	2.469,89	17.056,00	2.794,00	26.811,47

Sumber : Laporan DAK 2014 dan Statistik Dishut Kabupaten Tahun 2014

Tabel 4.5. Data Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-201

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan KTA (Unit)					Total (Unit)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	9	5	5	5	3	27
3	Lombok Tengah	0	0	2	3	3	8
4	Lombok Timur	0	3	5	2	4	14
5	Lombok Utara	8	7	11	1	6	33
6	Sumbawa Barat	0	0	7	3	3	13
7	Sumbawa	16	13	3	1	2	35
8	Dompu	2	2	3	3	3	13
9	Bima	1	2	6	5	2	16
10	Kota Bima	0	0	0	1	0	1
TOTAL		36	32	42	24	26	160

Sumber : Laporan DAK 2014 dan Statistik Dishut Kab./Kota Tahun 2014

Tabel 4.6. Data Perkembangan Mata Air di Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	TAHUN									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		Dalam Hutan	Luar Hutan	Dalam Hutan	Luar Hutan	Dalam Hutan	Luar Hutan	Dalam Hutan	Luar Hutan	Dalam Hutan	Luar Hutan
1	Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8
3	Lombok Barat	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
4	Lombok Tengah	38	4	38	4	39	47	39	47	39	47
5	Lombok Timur	12	29	12	29	23	65	23	65	23	65
6	Sumbawa Barat	15	9	15	9	12	13	12	13	12	13
7	Sumbawa	49	68	49	68	51	71	51	71	51	71
8	Dompu	21	23	21	23	40	33	40	33	40	33
9	Bima	27	15	27	15	38	33	38	33	38	33
10	Kota Bima	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL		180	175	180	175	221	289	221	289	221	289

Sumber : Balai Informasi Sumberdaya Air Provinsi NTB

Tabel 4.7. Data Luas Izin Hutan Kemasyarakatan Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Luas PAK HKm (Ha)	Realisasi Luas IUP HKm (Ha)					Total Realisasi (Ha)	Sisa Areal PAK HKm (Ha)
			s/d 2010	2011	2012	2013	2014		
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	2.042,00	758,00	0	1.284,00	0	0	2.042,00	0
3	Lombok Barat	2.688,00	185,00	226,00	0	0	1.562,32	1.973,32	714,68
4	Lombok Timur	2.680,00	420,00	0	309,69	594,39	0	1.324,08	1.355,92
5	Lombok Tengah	2.179,50	1.809,50	0	0	0	0	1.809,50	370,00
6	Sumbawa	4.030,00	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00	1.930,00
7	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dompu	6.383,00	0	0	240,00	3.593,00	0	3.833,00	2.550,00
9	Bima	2.964,00	0	0	0	0	0	0	2.964,00
10	Kota Bima	1.635,00	0	0	1.050,00	0	0	1.050,00	585,00
TOTAL		24.601,50	3.172,50	226,00	2.883,69	4.187,39	3.662,32	14.131,90	10.469,60

Sumber : Bidang RKH Dishut Provinsi NTB

Tabel 4.8. Data Jumlah Izin Hutan Kemasyarakatan Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Izin					Total Izin
		s/d 2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	0	1	1	0	0	2
3	Lombok Barat	1	1	0	0	9	11
4	Lombok Timur	1	0	1	2	0	4
5	Lombok Tengah	4	0	0	0	0	4
6	Sumbawa	0	0	0	0	5	5
7	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0
8	Dompu	0	0	1	4	0	5
9	Bima	0	0	0	0	0	0
10	Kota Bima	0	0	2	0	0	2
TOTAL		6	2	5	6	14	33

Sumber : Bidang RKH Dishut Provinsi NTB

Tabel 4.9. Data Nama Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani IUP HKm, Periode 2010-2014

No	Nama Kelompok	Lokasi	IUP HKm	Luas (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)
1	Kota Mataram	0	0	0	0
2	Lombok Utara			2.042,00	1.608
	- Maju Bersama	Desa Selengan Kec. Kayangan, Desa Rempek Kec. Gangga	297/1197.b/DPPKKP/2011	758,00	852
	- Maleko Bangkit	Desa Jenggala Kec. Tanjung	278/155/DPPKKP/2012	1.284,00	756
3	Lombok Barat			1.973,31	3.107
	- Mitra Sesaot	Desa Sesaot, Sedau, Lebah Sempage Kec. Narmada	2130/65/Dishut/2009	185,00	1.034
	- Merta Sari	Desa Senggigi Kec. Batu Layar	789/45/Dishut/2011	226,00	509
	- Buana Giri Buah Lilin	Desa Giri Tambesi Kec. Lembar	1168/43/Dishut/2014	121,00	103
	- Bonga Lestari	Desa Banyu Urip Kec. Gerung	1169/42/Dishut/2014	267,00	260
	- Bun Beleng Lestari	Desa Sekotong Timur Kec. Sekotong	1162/49/Dishut/2014	313,00	154
	- Sinar Lestari	Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar	1163/48/Dishut/2014	123,00	153
	- Malek Mudi	Desa Marije Timur Kec. Lembar	1164/47/Dishut/2014	85,16	77
	- Bina Lestari	Desa Giri Tembesi Kec. Lembar	1165/46/Dishut/2014	53,20	90
	- Batu Bao Lestari	Desa Sekotong Timur Kec. Sekotong	1166/45/Dishut/2014	86,75	114
	- Beriuk Pade Angen	Desa Sekotong Timur Kec. Sekotong	1167/44/Dishut/2014	184,21	219
	- Giri Madia Lestari	Desa Lingsar Kec. Lingsar	1170/41/Dishut/2014	329,00	394
4	Lombok Timur			1.324,08	988
	- Wana Lestari	Desa Belanting Kec. Sambelia	188.45/366/Hutbun/2010	420,00	437
	- Sekaroh Maju	Desa Sekaroh Kec. Jerowaru	188.45/443/Hutbun/2012	309,69	174

No	Nama Kelompok	Lokasi	IUP HKm	Luas (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)
	- Lembah Sempager	Desa Gunung Malang Kec. Pringgabaya	188.45/249/Hutbun/2013	360,00	187
	- Sekaroh Jaya	Desa Sekaroh Kec. Jerowaru	188.45/231.b/Hutbun/2013	234,39	190
5	Lombok Tengah			1.809,50	3.027
	- Mele Maju	Desa Lantan Kec. Batukliang Utara	38/2010	349,00	599
	- Gapoktan Karang Sidemen	Desa Kr. Sidemen Kec. Batukliang Utara	39/2010	403,00	741
	- Rimba Lestari	Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara	155/2010	840,00	1.261
	- MT. Darus Shidigien	Desa Seteling Kec. Batukliang Utara	160/2010	217,50	426
6	Sumbawa			2.100,00	479
	- Hutan Lestari	Desa Batu Dulang Kec. Batulante	666/Tahun 2014	1.000,00	68
	- Hutan Khompak	Desa Sabedo Kec. Utan	663/ Tahun 2014	500,00	108
	- Swagotra Arthagiri	Desa Sabedo Kec. Utan	664/ Tahun 2014	200,00	174
	- Unter Gadung	Desa Rhee Kec. Rhee	665/ Tahun 2014	200,00	45
	- Madu Abadi	Desa Olat Rawa Desa Moyo Hilir	667/ Tahun 2014	200,00	84
7	Sumbawa Barat	0	0	0	0
8	Dompu			3.833,00	1.547
	- Gapoktan	Desa Ranggo Kec. Pajo	298/2012	240,00	265
	- Wadu Bedi/So Tandi	Desa Tembala/ Woko Kec. Pajo	158.c/2013	355,00	172
	- Blok Kesi/ Tolokalo	Desa Kempo Tolokalo Kec. Kempo	158.a/2013	897,00	420
	- Blok Kesi/ Tolokalo	Desa Kempo Tolokalo Kec. Kempo	195/2013	1.366,00	420
	- Blok Lara/ Ncuni	Desa Kwangko, Nanga Tumpu Kec. Manggelewa	158.b/2013	975,00	270
9	Bima	0	0	0	0
10	Kota Bima			1.050,00	1.326

	- Kapenta Nanganae	Desa Jatibaru Kec. Asakota	222/2012	750,00	1.073
--	--------------------	----------------------------	----------	--------	-------

No	Nama Kelompok	Lokasi	IUP HKm	Luas (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)
	- Hambua Nanga	Desa Jatibaru Kec. Asakota	223/2012	300,00	253
TOTAL				14.131,90	12.082

Sumber : Bidang RKH Dishut Provinsi NTB

V. PEMANFAATAN HUTAN

Bidang Pemanfaatan Hutan **mempunyai tugas**, melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk, perencanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi dalam bidang pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan taman hutan raya lintas kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan budidaya dan produksi hasil hutan,
- b. Pelaksanaan urusan pengolahan dan peredaran hasil hutan,
- c. Pelaksanaan urusan aneka usaha kehutanan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Kawasan

Untuk kegiatan sektor kehutanan pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Luas izin pemanfaatan kawasan hutan untuk IUP HHK pada HT dan HA sampai dengan tahun 2014 seluas 99.873 Ha terdiri dari 4 ijin dan luas ijin untuk IUPHHK pada HTR sampai dengan tahun 2014 seluas 3.152,88 Ha terdiri dari 12 ijin.

Hutan Tanaman Industri (HTI)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) merupakan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang sudah tidak produktif untuk melakukan segala

bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) merupakan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan/koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Produksi Kayu Bulat

Produksi hasil hutan utama yang dihasilkan dari hutan adalah kayu bulat. Jumlah produksi kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara sebanyak 43.657,52 m³ dan yang berasal dari Hutan Rakyat sebanyak 41.516,28 m³.

Industri Primer Kehutanan

Hasil hutan kayu yang masih berupa kayu bulat agar bisa dinikmati oleh konsumen, maka harus melalui pengolahan di industri pengolahan kayu. Industri pengolahan kayu secara umum dibagi menjadi dua yaitu industri kayu primer yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kehutanan dan industri kayu lanjutan yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Perindustrian. Jumlah industri primer kehutanan adalah sebanyak 3 industri yang berupa industri penggergajian kayu kapasitas produksi ≤ 2.000 M³/pertahun.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Produk HHBK yang telah dimanfaatkan adalah jenis madu, rotan, akar lonto, bambu, aren, asam, dll.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan dana investasi pelestarian hutan. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor Kehutanan Periode 2010-2014 adalah Rp 9.630.976.961,- terdiri dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Tabel 5.1. Data Luas Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk IUPHHK pada HT dan HA

No.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	LUAS (Ha)	No. SK Penetapan Ijin	TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Lombok Barat	-	-	-	-	
2	Lombok Utara	- PT. Sadana Arif Nusa	1.246,00	256/Menhut-II/2011	12 Mei 2011	PT. Sadhana Arif Nusa Luas Total 3.810 Ha
3	Lombok Tengah	- PT. Sadana Arif Nusa	683,00	256/Menhut-II/2011	12 Mei 2011	
4	Lombok Timur	- PT. Sadana Arif Nusa	1.881,00	256/Menhut-II/2011	12 Mei 2011	
5	Sumbawa	-	-	-	-	
6	Sumbawa Barat	-	-	-	-	
7	Dompu	- PT. Usaha Tani Lestari*	17.450,00	660/Menhut-II/2009	11 Feb 2013	- *PT. Usaha Tani Lestari Luas Total 24.339 Ha - ** PT. Argo Wahana Bumi Luas Total 28.644 Ha
		- PT. Argo Wahana Bumi **	12.603,36	102/Menhut-II/2013	11 Feb 2013	
8	Bima	- PT. Usaha Tani Lestari*	6.889,00	660/Menhut-II/2009	11 Feb 2013	
		- PT. Koin Nesia	43.080,00	S.586/Menhut-VI/2009	29 Juli 2009	
		- PT. Argo Wahana Bumi**	16.040,64	102/Menhut-II/2013	11 Feb 2013	
9	Kota Bima	-	-	-	-	
TOTAL			99.873,00			

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 5.2. Data Luas Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk IUPHHK pada HTR

No.	KABUPATEN	NAMA KOPERASI	LUAS (Ha)	No. SK IUPHHK HTR	TAHUN	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lombok Barat	- KSU Dharma Lestari (Desa Kedaro- Kec. Sekotong)	492,27	1829/60/DISHUT/2011	2011	Mertha Sari	134	
						Mekar Jaya	191	
						Wana Bhakti	153	
		- Koperasi Produsen Suka Mulia Desa sekotong Barat Kec. Sekotong	412,14	538/278/Dishut/2014	2014	Beriuk Maju Pade Angen	113	
						Tunas Barokah	99	
						Tembowong Bersatu	67	
						Tunas Harapan	66	
2	Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	
3	Lombok Tengah	- KSU Tekad Lestari Desa Mangkung- Praya Barat Daya	72,99	394 Tahun 2010	2010	Patre	57	
						Aq. Ani	43	
						Pelas	58	
		- KSU Karya Utama Desa Pandan Indah- Praya Barat Daya	124,03	395 Tahun 2010	2010	Aq. Yusuf	70	
						Rege	65	
						Aik	40	
						H.M. Aripin	72	
		- KSU Makmur Bersama Desa Kabul- Praya Barat	356,11	53 Tahun 2011	2011	Aq. Junaidi	54	
						Lender	51	
						Kangas	82	
						Pampang	50	
						Kabul I	83	
						Kabul II	43	
						Kabul III	96	
						Kabul IV	40	
						Kabul V	83	

NO	KABUPATEN	NAMA KOPERASI	LUAS (Ha)	NO SK IUPHHK HTR	TAHUN	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	KET
		- KSU Maju Bersama Desa Batu Jangkih-Praya Barat	130,22	52 Tahun 2011	2011	Bunga Hijau	38	
						Lendek	40	
						Aik	41	
						Aq. Girin	28	
		- KSU Lembah Sari Desa Kabul-Praya Barat	153,29	443 Tahun 2014	2014	Kelompok I	51	
						Kelompok II	82	
						Kelompok III	50	
						Kelompok IV	83	
		- KSU Sengkong Paok Bersatu Desa Mangkung-Praya Barat	57,82	450 Tahun 2014	2014	Kelompok I	51	
						Kelompok II	82	
4	Lombok Timur	-	-	-	-	-	-	
5	Sumbawa	- KSU Uma Dene Desa Pemasar Kec. Maronge	198,19	P.284 Tahun 2009	2009	Kelompok I	12	
						Kelompok II	11	
						Kelompok III	9	
						Kelompok IV	11	
						Kelompok V	11	
						Kelompok VI	11	
						Kelompok VII	11	
6	Sumbawa Barat	- KSU Brang Rea Desa Seminar Salit Dan Desa Tepas Kec. Brang Rea	134,08	1561 Tahun 2012	2012	Blok I	34	
						Blok II	34	
		- KSU Batu Pisak Desa Beru dan Desa Tepas Kec. Brang Rea	666,74	1560 Tahun 2012	2012	Blok I	50	
						Blok II	50	
						Blok III	50	
						Blok IV	50	

NO	KABUPATEN	NAMA KOPERASI	LUAS	NO SK IUPHHK HTR	TAHUN	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	KET
7	Dompu	- KSU Swadaya LPMP	355	158 Tahun 2010	2010	Fo'o Mpoa	26	
		Desa Jambu Kec. Pajo				Sinar Baru	25	
		Dan Desa Cempi Jaya				Nggaro Uma	27	
		Kec. Hu'u				Sama Ade	28	
						Felo Janga I	28	
						Maju Bersama	21	
						Sambi Nae	28	
						Sama Kai	23	
						Cempi Makmur	24	
						Hutan Jati	21	
						Sori Moro	21	
						Foto Fare	24	
						Balumba Ngampe	24	
8	Bima	-	-	-	-	-	-	
9	Kota Bima	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			3.152,88				2.894	

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Prov. NTB

Tabel 5.3. Data Perkembangan Luas Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk IUPHHK pada HTR

No.	KABUPATEN/KOTA	Luas Areal Pencadangan	REALISASI LUAS IUPHHK-HTR (Ha)					Total	SISA
			s/d 2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lombok Barat	1.495	0	0	492,27	0	412,14	904,41	590,59
2	Lombok Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lombok Tengah	895	197,02	486,33	0	0	211,11	894,46	0,54
4	Lombok Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sumbawa	491	198,19	0	0	0	0	198,19	292,81
6	Sumbawa Barat	1.160	0	0	0	800,82	0	800,82	359,18
7	Dompu	355	355,00	0	0	0	0	355,00	0
8	Bima	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4.396,00	750,21	486,33	492,27	800,82	623,25	3.152,88	1.243,12

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Prov. NTB

Tabel 5.4. Data Produksi Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Hutan Rakyat berdasarkan Pembayaran PNBP tahun 2010 – 2014

No.	Sumber Kayu	JUMLAH PRODUKSI (m3)					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HUTAN NEGARA	0	19.468,50	9.332,98	11.014,41	3.841,63	43.657,52
2	HUTAN RAKYAT	16.528,98	19.121,52	4.639,00	179,14	1.047,64	41.516,28
TOTAL		16.528,98	38.590,02	13.971,98	11.193,55	4.889,27	85.173,80

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Prov. NTB

Tabel 5.5. Data Jumlah Industri Primer Kehutanan Menurut Jenis Industri

No	Jenis Industri	Jumlah Industri Primer (unit)					Ket.
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Penggergajian Kayu Kapasitas Produksi \leq 2.000 M3 per tahun	0	1	2	2	3	
2	Serpih Kayu	0	0	0	0	0	
3	Panel Kayu	0	0	0	0	0	
4	Biomassa Kayu	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	1	2	2	3	

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 5.6. Data Jumlah Industri Primer Kehutanan di Tiap Kabupaten, Periode 2010-2014

No	Jenis Industri	Jumlah Industri Primer (unit)					Ket.
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	
2	Lombok Barat	0	0	0	0	0	
3	Lombok Utara	0	0	0	0	0	
4	Lombok Tengah	0	0	0	0	0	
5	Lombok Timur	0	0	0	0	0	
6	Sumbawa	0	0	0	0	1	
7	Sumbawa Barat	0	1	2	2	2	
8	Dompu	0	0	0	0	0	
9	Bima	0	0	0	0	0	
10	Kota Bima	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	1	2	2	3	

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 5.7. Data Jumlah Kayu Masuk Menurut Daerah Asal Kayu, Periode 2010-2014

No	Daerah Asal Kayu	Jenis Kayu	Volume Kayu (m3)					Total (m3)
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kalimantan Tengah	RC	533,29	0	0	0	0	533,29
2	Kalimantan Selatan	RC	2.100,39	1.875,69	0	313,68	325,30	4.615,06
3	Kalimantan Timur	RC	191,06	0	0	279,00	0	470,06
4	Jawa Tengah	Jati	1.673,92	0	0	0	0	1.673,92
5	Sulawesi Tenggara	RC	322,65	7.365,71	10.596,02	126,26	7.035,07	25.445,71
6	Sulawesi Tengah	RC	0	0	0	0	0	0
7	Maluku	RC	0	0	0	838,78	0	838,78
8	NTT	RC	249,72	0	0	0	0	249,72
9	Sulawesi Barat	RC	0	853,65	0	0	0	853,65
10	Sulawesi Utara	RC	0	0	0	195,00	0	195,00
TOTAL			5.071	10.095	10.596,02	1.752,72	7.360,37	34.875,19

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Kab./Kota

Tabel 5.8. Data Jumlah Distribusi Dokumen SKSKB ke Tiap Kabupaten, Periode 2010-2014

No	Daerah Asal Kayu	Volume Kayu (m3)					Total (m3)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	260	215	118	0	0	593
3	Lombok Tengah	270	350	163	75	75	933
4	Lombok Timur	0	760	494	0	100	1.354
5	Lombok Utara	405	200	680	0	0	1.285
6	Sumbawa Barat	494	900	1.220	900	0	3.514
7	Sumbawa	391	800	194	60	0	1.445
8	Dompu	425	535	374	0	0	1.334
9	Kota Bima	109	50	28	0	0	187
10	Bima	550	510	252	0	0	1.312
TOTAL		2.904	4.320	3.523	1.035	175	11.957

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 5.9. Data Jumlah Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Daftar Penerimaan PSDH Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kayu					Total (m3)
		Rimba Campuran	Kayu Indah	Kayu Merbau	Meranti	Jati	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	0	0	0	0	0	0
3	Lombok Tengah	143,24	14,93	0	0	6,80	164,97
4	Lombok Timur	1.121,30	42,76	0	0	14,42	1.178,48
5	Lombok Utara	0	0	0	0	0	0
6	Sumbawa Barat	2.413,60	80,65	34,73	165,33	0	2.694,31
7	Sumbawa	397,89	0	0	0	54,65	452,54
8	Dompu	398,97	0	0	0	0	398,97
9	Kota Bima	0	0	0	0	0	0
10	Bima	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4.475,00	138,34	34,73	165,33	75,87	4.889,27

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 5.10. Data Jumlah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Berdasarkan Daftar Penerimaan PSDH Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jenis HHBK				Total
		Rotan (Ton)	Akar Lonto (m3)	Bambu (Batang)	Madu (liter)	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	0	0	0	0	0
3	Lombok Tengah	0	0	0	0	0
4	Lombok Timur	0	0	0	0	0
5	Lombok Utara	0	0	0	0	0
6	Sumbawa Barat	130	0	11.000	0	11.130
7	Sumbawa	30	48	11.000	60.141	71.219
8	Dompu	0	0	0	0	0
9	Kota Bima	0	0	0	0	0
10	Bima	0	0	0	0	0
TOTAL		160	48	22.000	60.141	82.349

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 5.11. Data Penerimaan PSDH-DR tiap Kabupaten/Kota Periode Tahun 2010 s/d 2014

No	Kabupaten/Kota	TAHUN										Total
		2010		2011		2012		2013		2014		
		PSDH	DR	PSDH	DR	PSDH	DR	PSDH	DR	PSDH	DR	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Barat	0	0	0	0	478.400	383.828	344.061	1.368.686	0	0	2.574.975
3	Lombok Tengah	0	0	0	0	64.060.824	96.253.099	39.065.821	67.311.110	4.596.854	8.726.174,82	280.013.883
4	Lombok Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	19.678.965	56.754.144,08	76.433.109
5	Lombok Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumbawa Barat	87.946.727	396.245.374	905.897.004	2.244.523.174	679.913.055	1.922.535.014	462.359.475	1.547.385.904	97.489.778	348.158.937,63	8.208.262.342
7	Sumbawa	20.030.228	34.889.030	23.144.849	35.888.041	115.158.538	349.897.494	66.558.856	208.745.284	50.283.247	31.481.575.22	881.157.884
8	Dompu	4.349.140	13.406.016	10.035.395	32.770.566	10.658.992	12.762.543	9.072.270	42.114.666	11.472.610	47.774.465,35	176.661.507
9	Bima	0	0	1.314.630	4.558.631	0	0	0	0	0	0	5.873.261
10	Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		112.326.095	444.540.420	940.391.878	2.317.740.412	870.269.809	2.381.831.978	577.400.483	1.866.925.650	183.521.454	492.895.297,10	9.630.976.961

Sumber : Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB

VI. PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN

Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan **mempunyai tugas**, melaksanakan pengelolaan sumber benih, produksi bibit, pengawasan dan pengendalian produksi serta peredaran benih dan bibit tanaman hutan pada skala provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan pembenihan tanaman hutan,
- b. Pelaksanaan urusan pembibitan tanaman hutan,
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Benih Tanaman Kehutanan

Sumber benih adalah suatu tegakan hutan, baik berupa hutan alam maupun hutan buatan yang ditunjuk atau dibangun khusus untuk dikelola guna produksi benih sehingga perlu dilakukan sertifikasi sumber benih. Luas sumber benih bersertifikat di Provinsi NTB adalah 187,13 Ha terdiri dari 14 jenis tanaman.

Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan

Dinas kehutanan menyediakan bibit tanaman kehutanan untuk mendukung kegiatan penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan kosong yang dimilikinya dengan menanam tanaman kehutanan. Jumlah bibit tanaman kehutanan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB periode 2010-2014 adalah 5.048.000 batang.

Tabel 6.1. Data Luas Sumber Benih Tanaman Kehutanan Tiap Kabupaten/Kota Menurut Jenis Tanaman

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)/ Jenis Tanaman														Total (Ha)
		Sengon	Rajumas	Gaharu	Mahoni	Bayur	Kelicung	Kelokos	Bakau	Johar	Kemiri	Jati	Sonokeling	Gmelina	Jabon	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	0,93	1,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,81
3	Lombok Barat	0	0	7,95	3,51	0	0	0	0	0	0	0	3,85	0	0	15,31
4	Lombok Tengah	4,84	5,00	0	13,72	0,23	1,84	0,62	0	0	0	0	0	0	0	26,25
5	Lombok Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	27,79	0	1,16	0	0	0	0	0	0	28,95
7	Sumbawa	0	0	0	4,90	0	0	0	0	6,00	2,46	63,25	1,65	16,47	0	94,73
8	Dompu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,68	0	2,96	0	0	5,64
9	Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,56	0	0	0	0	8,56
10	Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,45	1,63	1,80	4,88
TOTAL		5,77	6,88	7,95	22,13	0,23	29,63	0,62	1,16	6,00	13,70	63,25	9,91	18,10	1,80	187,13

Sumber : BPPTH Dishut NTB

Tabel 6.2. Data Jumlah Sumber Benih Tanaman Kehutanan Tiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Benih/Jenis Tanaman														Total (jenis)
		Sengon	Rajumas	Gaharu	Mahoni	Bayur	Kelicung	Kelokos	Bakau	Johar	Kemiri	Jati	Sonokeling	Gmelina	Jabon	
1	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lombok Utara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Lombok Barat	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
4	Lombok Tengah	1	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
5	Lombok Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
7	Sumbawa	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	7
8	Dompu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
9	Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
10	Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
TOTAL		2	2	2	6	1	2	1	1	1	3	3	4	2	1	31

Sumber : BPPTH Dishut NTB

Tabel 6.3. Data Jumlah Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan Tiap Kabupaten/Kota, Periode 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit (Batang)					Total (Btg)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Kota Mataram	900.000	508.000	440.000	0	0	1.848.000
2	Lombok Utara	60.000	50.000	50.000	50.000	25.000	235.000
3	Lombok Barat	60.000	50.000	50.000	550.000	175.000	885.000
4	Lombok Tengah	60.000	50.000	50.000	100.000	25.000	285.000
5	Lombok Timur	60.000	50.000	50.000	0	75.000	235.000
6	Sumbawa	60.000	50.000	100.000	100.000	25.000	335.000
7	Sumbawa Barat	60.000	50.000	50.000	50.000	25.000	235.000
8	Dompu	120.000	100.000	100.000	50.000	0	370.000
9	Bima	60.000	50.000	50.000	100.000	0	260.000
10	Kota Bima	60.000	100.000	100.000	50.000	50.000	360.000
TOTAL		1.500.000	1.058.000	1.040.000	1.050.000	400.000	5.048.000

Sumber : BPPTH Dishut NTB

VII. TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Balai Taman Hutan Raya Nuraksa **mempunyai tugas**, melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Nuraksa sebagai areal konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara alamiah (natural) maupun secara buatan (artificial). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Taman Hutan Raya Nuraksa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan konservasi sumberdaya alam,
- b. Pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan,
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan Blok

Luas kawasan Taman Hutan Raya Nuraksa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Sementara Batas Keliling Areal Pengelolaan Tahura adalah 2.579,04 Ha dengan panjang batas keliling 30.560,20 m. Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan Taman Hutan Raya ditata ke dalam blok-blok pengelolaan yang terdiri dari Blok Koleksi, Blok Pemanfaatan Tradisional, Blok Perlindungan serta Blok Religi Budaya & Sejarah.

Keanekaragaman Hayati

Kawasan Taman Hutan Raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dari hasil identifikasi ditemukan 44 jenis tumbuhan (flora) dan terdapat 38 jenis satwa (fauna).

Jasa Lingkungan

Salah satu bentuk pemanfaatan Taman Hutan Raya sebagai kawasan konservasi yaitu pemanfaatan jasa lingkungan berupa kegiatan religi budaya, perlindungan tata air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan lingkungan dan karbon. Di kawasan Taman Hutan Raya terdapat 6 potensi jasa lingkungan.

Tabel 7.1. Data Luas Kawasan Taman Hutan Raya Menurut Jenis-Jenis Blok Pengelolaan

No	Jenis-Jenis Blok Pengelolaan	Luas (Ha)
1	Blok Koleksi	284.46
2	Blok Pemanfaatan Tradisonal	1,036.54
3	Blok Perlindungan	1,150,47
4	Blok Religi Budaya dan Sejarah	107.57
TOTAL		2,579.04

Sumber : Balai Tahura Dishut NTB (BA Hasil Pengukuran Sementara Batas Keliling Areal Pengelolaan Tahura dengan Panjang Batas Keliling 30.560,20 m)

Tabel 7.2. Data Luas Kegiatan Reboisasi Di Kawasan Taman Hutan Raya Tiap Blok Pengelolaan, Periode 2010-2014

No	Jenis Blok Pengelolaan	Luas Kegiatan Reboisasi Di Kawasan Tahura (Ha)					Total (Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Blok Koleksi	0	0	0	0	96,18	96,18
2	Blok Pemanfaatan Tradisional	0	450,67	359,41	310,12	0	1.120,20
3	Blok Perlindungan	0	0	0	0	111,4	111,4
4	Blok Religi Budaya dan Sejarah	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	450,67	359,41	310,12	207,58	1.327,78

Sumber : Balai Tahura Dishut NTB

Tabel 7.3. Data Alokasi Jumlah Bibit untuk Kegiatan Penghijauan Lingkungan pada Taman Hutan Raya, Periode 2010-2014

No	Nama Kelompok/ Dusun/ Desa	Jumlah Bibit (Batang)					Total (Btg)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Desa Lebah Sempage Kec. Narmada Lobar	0	1.000	2.100	20.000	20.000	43.100
2	KTH Forum Kawasan Sesaot Kec. Narmada Lobar	0	19.700	1.000	25.000	20.000	65.700
3	Dusun Jurang Malang Desa Pakuan Kec Narmada Lobar	0	1.000	1.000	25.000	20.000	47.000
4	KTH Tani Tunas Mandiri Sengkol Kec. Pujut Loteng	0	0	7.000	0	0	7.000
5	Dusun Persil Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Loteng	0	0	12.000	0	0	12.000
TOTAL		0	21.700	23.100	70.000	60.000	174.800

Sumber : Balai Tahura Dishut NTB

Tabel 7.4. Data Jenis Flora di Kawasan Taman Hutan Raya

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal
1	<i>Dyospiros inophyllum</i>	Kayu Api
2	<i>Pterospermum javanicum</i>	Bajur
3	<i>Artocarpus lanceifolius</i>	Bangsai
4	<i>Polyalthia glauca</i>	Banitan
5	<i>Pouteria duclitan</i> Bachni.	Baoda
6	<i>Saurauia pendula</i>	Bebenang
7	<i>Ficus benjamina</i>	Beringin
8	<i>Planchonella notida</i>	buah odak
9	<i>Ficus variegata</i>	Bunut
10	<i>Erythrina orientalis</i>	Dadap
11	<i>Durio zibethinus</i>	Durian
12	<i>Dysoxylum hexandrum</i>	Garu
13	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume	Goak
14	<i>Lophopetalum javanicum</i>	Perupuk
15	<i>Eugenia subglauca</i>	jambu pahit
16	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Jamplung
17	<i>Laportea stimulans</i> (Lf) Gaud	Jelatang
18	<i>Eugenia cumini</i>	Jowet
19	<i>Syzygium polyanthum</i>	Jukut
20	<i>Glochidion sericeum</i>	kayu nyam
21	<i>Aleurites moluccana</i>	Kemiri
22	<i>Cananga odorata</i>	Kenongo
23	<i>Sterculia foetida</i>	Kepuh
24	<i>Baccaurea racemosa</i>	Kepundung

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal
25	<i>Schleichera oleosa</i>	Kesambi
26	<i>Syzygium javanica</i>	Klokos
27	<i>Voacanga sp</i>	Kumbi
28	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	Lemboke
29	<i>Pometia tomentosa</i>	Lingsar
30	<i>Alstonia scholaris</i>	Litaq suara
31	<i>Swietenia mahagony</i>	Mahoni
32	<i>Fimbristylis globulods</i>	Mendong
33	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Nangka
34	<i>Duabanga moluccana</i>	Rajumas
35	<i>Ceiba petandra</i>	Randu
36	<i>Paraserianthes falcataria</i>	Sengon
37	<i>Sandoricum koetjape</i>	Sentul
38	<i>Mimusops elengi</i>	Tanjung gunung
39	<i>Artocarpus elastic</i>	Terep
40	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Waru
41	<i>Gmelina arborea</i>	Gmelina
42	<i>Intsia bijuga</i>	Ipil
43	<i>Cometia pinnata</i>	Matoa

Tabel 7.5. Data Jenis Fauna di Kawasan Taman Hutan Raya

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal
1	<i>Gallus gallus</i>	Ayam hutan
2	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung ketak-ketak
3	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung kecimbret / burung puyuh
4	<i>Pygnonotus goiavier</i>	Burung cerucuk
5	<i>Columba vitiensis</i>	Burung dawé
6	<i>Heliastur Indus</i>	Burung elang
7	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung enggong-enggong
8	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Burung kecial
9	<i>Orthotomus sepium</i>	Burung kelincar
10	<i>Cacatua galerita</i>	Burung keluwing/ mirip kakatua
11	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung kemawi
12	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung kenjaling
13	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung kerate
14	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung Kloncer
15	<i>Philemon buceroides</i>	Burung koak kaok
16	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung kreak
17	<i>Zoothera peronii</i>	Burung punglor hitam
18	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung serepa kelong
19	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung sintu
20	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung tegunggung
21	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung telesek
22	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung tempone
23	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Burung tong-tong suit
24	<i>Sus scrofa</i>	Babi hutan / babi liar
25	<i>Macaca fascicularis</i>	Kera

No	Nama Ilmiah	Nama Lokal
26	<i>Nama ilmiah belum tersedia</i>	Monyet
27	<i>Hystrik branchiura</i>	Landak
28	<i>Tracypithecus auratus</i>	Lutung
29	<i>Cervus timorensis</i>	Rusa
30	<i>Manis Javanica</i>	Trenggiling
31	<i>Varanus salvator</i>	Biawak
32	<i>Mabuya multifasciata</i>	Kadal
33	<i>Naja sputatrik</i>	Ular blai / sendok
34	<i>Naja tripudont</i>	Ular kobra
35	<i>Phyton malurus</i>	Ular piton / ular sawah
36	<i>Trimeresurus Albolabris</i>	Ular sanggit
37	<i>Delias Fruhstorfsi</i>	Kupu-kupu

Tabel 7.6. Data Jumlah Jasa Lingkungan di Kawasan Taman Hutan Raya

No	Jenis Jasa Lingkungan	Lokasi	Jumlah (Lokasi)
1	Religi dan budaya	Segenter	1
2	Perlindungan dan pemanfaatan tata air	Segenter, Stipa	3
3	Wisata alam dan rekreasi	Segenter, Anjana	2
TOTAL			6

Sumber : Balai Tahura Dishut NTB

VIII. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RINJANI BARAT

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat **mempunyai tugas**, melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsi dan peruntukannya dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada wilayah KPH Rinjani Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan budidaya dan produksi hasil hutan,
- b. Pelaksanaan urusan pengolahan dan pemasaran hasil hutan,
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luas Kawasan KPH Rinjani Barat

KPH Rinjani Barat merupakan KPH yang memiliki kawasan fungsi lindung dan fungsi hutan produksi, dimana luas yang dominan KPH Rinjani Barat adalah kawasan hutan lindung sehingga termasuk KPHL. Luas keseluruhan KPH Rinjani Barat adalah 40.983 Ha.

Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan kawasan KPH dilakukan melalui kegiatan budidaya tanaman penghasil HHBK dan pemanfaatan jasa lingkungan. Penanaman tanaman budidaya terdiri dari 10 jenis tumbuhan dengan luasan 3.195 Ha. Potensi jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan seluas 28.943 Ha terdiri dari 10 lokasi.

Tabel 8.1. Data Luas Kawasan KPH Rinjani Barat Menurut Kabupaten dan Fungsi Hutan

No	Kabupaten/Kelompok Hutan	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Jumlah (Ha)
A	Kabupaten Lombok Utara	11.198,22	6.984,38	5.171,52	23.354,12
	- KH. Gunung Rinjani (RTK1)	10.568,00	6.984,38	4.431,74	21.984,12
	- KH. Pandan Mas (RTK 2)	630,00	0	739,78	1.370,00
B	Kabupaten Lombok Barat	17.628,88	0	0	17.628,88
	- KH. Gunung Rinjani (RTK 1)	17.626,18	0	0	17.626,18
	- KH. Ranget (RTK 6)	12,70	0	0	2,70
TOTAL		28.827,10	6.984,38	5.171,52	40,983,00

Sumber : KPH Rinjani Barat

Tabel 8.2. Data Luas Kawasan KPH Rinjani Barat Menurut Pembagian Blok

No	Nama Blok Tiap Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	28.911
	- Blok Inti	15.985
	- Blok Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat	1.303
	- Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu	11.623
2	Hutan Produksi	12.072
	- Blok Perlindungan	2.301
	- Blok Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat	2.962
	- Blok Pemanfaatan HHK-HT	1.360
	- Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu	5.218
	- Blok Khusus	231
TOTAL		40.983

Sumber : KPH Rinjani Barat

Tabel 8.3. Data Luas Kegiatan Reboisasi di Kawasan KPH Rinjani Barat Tiap Resort, Periode 2010-2014

No	Resort	Luas Kegiatan Reboisasi Di Kawasan KPH Rinjani Barat (Ha)					Total (Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Malimbu	133	150	500	353	100	1.236
2	Meninting	0	100	500	0	175	775
3	Jangkok	10	30	420	0	100	560
4	Monggal	300	0	450	25	150	925
5	Tanjung	0	0	405	0	75	480
6	Santong	0	0	250	50	50	350
7	Sesaot	0	0	0	0	0	0
8	Senaru	0	0	0	0	25	25
TOTAL		443	280	2.525	428	675	4.351

Sumber : KPH Rinjani Barat

Tabel 8.4. Data Luas Tanaman Budidaya di Kawasan KPH Rinjani Barat, Periode 2010-2014

No	Jenis Komoditas	Luas Areal Tanaman Budidaya Di Kawasan KPH Rinjani Barat (Ha)					Total (Ha)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Ketak	5	20	10	0	0	35
2	Pandan	0	0	5	0	0	5
3	Bambu	5	10	0	0	0	15
4	Durian	50	100	200	0	0	370
5	Sukun	20	50	0	0	0	90
6	Kemiri	0	50	0	0	0	50
7	Nyamplung	20	0	0	0	0	40
8	Nangka	50	100	0	0	0	150
9	Karet	0	0	1.750	0	150	1.900
10	Kayu Putih	0	0	750	0	0	750
TOTAL		150	330	2.715	0	0	3.195

Sumber : KPH Rinjani Barat

Tabel 8.5. Data Luas dan Potensi Jasa Lingkungan Di Kawasan KPH Rinjani Barat

No	Jenis Jasa Lingkungan	Luas (Ha)	Jumlah
1	Karbon	28.911	1
2	Perlindungan dan pemanfaatan tata air	21	6
3	Wisata alam dan rekreasi	11	3
TOTAL		28.943	10

Sumber : KPH Rinjani Barat

Tabel 8.6. Rata-rata Stok Karbon setiap Komponen Menurut Tipe Hutan pada KPH Rinjani Barat

No	Land Use (Forest type)	Rata-rata Stock Karbon Komponen Ekosistem (Ton/Ha)					
		Above-ground	Below-ground	Dead wood	Litter	Soil	Total
1	Hutan Primer	109,9	29,7	18,3	1,7	47,0	206,6
2	Hutan Sekunder	97,8	26,4	21,4	1,8	32,8	180,1
3	Semak Belukar	26,55	16,7	16,7	1,6	23,4	75,3

Sumber :Hasil survey KPH Rinjani Barat, KFRI, Prodi Kehutanan Unram dan PT. HAN (2013)